

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo)**

Yoma Achmad Faizal

Rizal Yaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yachmadfaizal@gmail.com

ABSTRACT

This Study aims to analyze the influence of government apparatus competency, adherence to rule of law, and accounting control on performance accountability of government entity. The sample in this study are the head of financial sub division and the staff of financial sub division on Work Unit in Kulon Progo Regency. This study uses primary data collected using questionnaires. The sample in this research amounted to 82 respondents selected using purposive sampling. The analytical tool used in this study is SPSS 15. Based on the result of data analysis shows that government apparatus competency has no effect on performance accountability of government entity. Adherence to rule of law and accounting control has significant positive effect on performance accountability of government entity.

Keywords: government apparatus competency, adherence to rule of law, accounting control, performance accountability of government entity

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, sistem pemerintahan di Indonesia berganti menjadi otonomi daerah.

Daerah otonom diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas. Dengan wewenang tersebut, daerah dapat menentukan alokasi sumber daya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, serta dikelola secara bijak dengan arah dan tujuan yang jelas. Otonomi daerah membuat campur tangan pemerintah

pusat menjadi berkurang, sehingga pemerintah pusat dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan negara atau nasional secara keseluruhan (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Oleh karena itu wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan yang telah dilakukannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik (Putri dkk., 2015). Sofyani

dan Akbar (2013) mengemukakan bahwa LAKIP dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan atas program kerja untuk tahun berikutnya.

Menurut Pratolo (2005) tuntutan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik semakin menguat. Organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan informasi atas aktivitas, kebijakan, maupun program yang dilakukannya termasuk mengenai pengelolaan sumber daya. Namun, pengelolaan sumber daya di Indonesia masih banyak diwarnai dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2016, diketahui bahwa masih banyak kabupaten/kota yang mendapatkan nilai evaluasi di bawah B. Evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016 dibagi menjadi tiga regional dengan jumlah 425 kabupaten/kota atau 83% dari total kabupaten/kota di Indonesia. Rata-rata nilai evaluasi mengalami kenaikan sebesar 2,95 poin menjadi 49,87 dari yang sebelumnya 46,92 pada tahun 2015. Walaupun mengalami peningkatan, namun masih banyak kabupaten/kota yang mendapatkan nilai evaluasi dibawah 50 atau berada dibawah nilai CC.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi, Asman Abnur, mengatakan bahwa akan menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah daerah yang memiliki nilai AKIP baik (www.menpan.go.id). Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu didukung oleh faktor aparatur pemerintah yang kompeten, ketaatan pada peraturan

perundangan dan pengendalian akuntansi. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak mengandung informasi yang salah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
2. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Davis dkk. (1997), *stewardship theory* merupakan teori yang memberikan gambaran mengenai situasi dimana para manajer lebih termotivasi pada tujuan organisasi daripada tujuan individu. Dalam *stewardship theory*, *steward* akan berperilaku kolektif karena *steward* berusaha mencapai tujuan organisasi (Davis dkk., 1997). Perilaku ini akan menguntungkan *principal* karena tujuan mereka diteruskan oleh *steward*. *Stewardship theory* mengasumsikan hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan publik.

Kompetensi Aparatur Pemerintah

Manusia adalah satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lain bekerja dan berdampak langsung terhadap organisasi. Sofyani dan Akbar, (2013) berpendapat bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kompetensi aparatur yang berada dalam organisasi tersebut. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan (Putri dkk., 2015). Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama instansi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansi. Informasi yang disajikan oleh instansi juga tidak lepas dari unsur manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pemerintah dapat berkualitas dan memberikan kontribusi yang maksimal.

Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan

sistem hukum apa yang akan diterapkan oleh negaranya, apakah akan menerapkan sistem *civil law* atau *common law*. Apabila suatu negara menggunakan *civil law* maka setiap aktivitas negara tersebut didasarkan atas peraturan perundangan yang terstruktur serta *procedural*, sedangkan apabila suatu negara menggunakan sistem *common law* maka setiap kegiatan di negara tersebut didasarkan pada kesepakatan politik yang bersumber dari kasus demi kasus (Pratolo dkk., 2016). Sekompleks apapun atau sebagus apapun suatu peraturan, akan menjadi sia-sia apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat. Setiap warga negara termasuk pemerintah harus taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku demi mewujudkan keadaan yang tertib dan aman.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah sistem pengendalian yang berbasis akuntansi (Setyawan dkk., 2017). Menurut Hery (2009), tujuan dari pengendalian akuntansi

adalah mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Menurut Setyawan dkk. (2017) pengendalian akuntansi mencakup sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur *monitoring* yang didasarkan pada informasi. Sistem akuntansi merupakan hal yang penting karena dapat dijadikan alat untuk memotivasi, mengukur dan memberikan sanksi atas tindakan pegawai dalam organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999). Lingkup akuntabilitas meliputi segala kegiatan utama instansi pemerintah yang mendukung pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kegiatan utama yang dimaksud yaitu:

- a. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah
- b. Program kerja yang menjadi isu nasional
- c. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi

Pemerintah dituntut untuk bertanggungjawab untuk menjelaskan kinerja yang telah dicapai kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat akan memberikan motivasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan cara menyusun kegiatan, kebijakan, dan anggaran sebaik mungkin.

Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sofyani dan Akbar (2015) mengatakan bahwa aparatur pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban akan lebih mampu menjalankan tugas dan implementasi akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban. Apabila seorang aparatur pemerintah tidak memiliki kompetensi maka kinerjanya akan terhambat dan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Menurut Setyawan dkk. (2017) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang maksimal. Selain itu, informasi akuntabilitas

kinerja yang dihasilkan tidak mengandung kesalahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₁: Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-undang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang dapat membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih aman dan tertib. Menurut Pratolo dkk. (2016) akuntansi sektor publik menganut sistem hukum *civil law* dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat pada peraturan perundangan.

Dalam teori *stewardship*, *steward* akan termotivasi pada tujuan organisasi dan bertindak untuk kepuasan pihak yang berkepentingan. Peraturan perundangan dapat dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja tidak lepas dari dukungan perundang-undangan yang memadai dan ketaatan dalam suatu kelembagaan seperti perbaikan laporan akuntabilitas. Dengan adanya ketaatan pada peraturan perundangan diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂: Ketaatan pada peraturan perundangan positif berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian akuntansi dapat mempermudah organisasi dalam melakukan perencanaan dan pengawasan kegiatan. Sistem akuntansi yang efektif dapat berakibat pada kinerja yang semakin baik. Apabila informasi akuntansi gagal digunakan maka manajemen sumber daya akan menjadi tidak efektif serta kinerja organisasi akan mengalami kemunduran (Mulyadi, 2008). *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki melalui kinerja organisasi sehingga fungsi pelayanan dapat dimaksimalkan. Penggunaan pengendalian akuntansi memungkinkan pemerintah dalam membuat keputusan dan mengontrol operasi dengan baik, memperkirakan biaya serta memilih alternatif terbaik sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₃: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo. Sampel dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Kulon Progo yang meliputi dinas dan badan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penentuan sampel didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Sub Bagian Keuangan di OPD Kabupaten Kulon Progo.
2. Telah menjabat pada bagian tersebut minimal satu tahun.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner akan dibagikan kepada responden secara langsung dan meminta kuesioner kembali pada tanggal yang telah ditentukan oleh responden. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan mengenai kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian dilakukan di 20 OPD Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 19 Dinas dan 1 Badan. Penyebaran dan pengembalian kuesioner dilaksanakan dari tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2018. Jumlah kuesioner yang tersebar sebanyak 103 kuesioner. Jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 11 kuesioner, sehingga kuesioner yang kembali

sebanyak 92 kuesioner. Kuesioner yang tidak dapat diolah karena ketidaklengkapan dalam pengisian kuesioner adalah sebanyak 10 kuesioner, sehingga total kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 82 kuesioner atau 79,6%.

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai KMO $> 0,5$ dan keseluruhan item pertanyaan memiliki loading faktor $> 0,4$. Oleh karena itu, seluruh item instrumen penelitian dapat dinyatakan *valid*

Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,7$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dinyatakan *reliabel*

Uji Normalitas

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
82	0,841	0,479	Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil uji normalitas pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,479 lebih besar daripada nilai *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
KAP	0,802	1,248	Tidak Terkena Multikolinearitas
KPP	0,843	1,186	Tidak Terkena Multikolinearitas
PA	0,771	1,296	Tidak Terkena Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Kesimpulan
1 (Constant)		
KAP	0,525	Tidak Terkena Heteroskedastisitas
KPP	0,104	Tidak Terkena Heteroskedastisitas
PA	0,467	Tidak Terkena Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Data yang baik memiliki sifat homogen. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, seluruh variabel memiliki nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.49
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.456	2.365

a. Predictors: (Constant), PA, KPP, KAP

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,456. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu yaitu kompetensi aparatur pemerintah (KAP), ketaatan pada peraturan perundangan (KPP), dan pengendalian akuntansi (PA) dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebesar 45,6 %, sisanya sebesar 54,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

UJI F

Tabel 4.5
Hasil Uji F

Model	Sig.	Kesimpulan
1	0,000	Pengaruh Secara Simultan

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4.5 menunjukkan nilai sig $0,000 < \alpha 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen

yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

UJI T

Tabel 4.6
Hasil Uji T

Model	B	Sig.	Kesimpulan
1 (Constant)	14,029		
KAP	-0,16	0,829	Tidak Diterima
KPP	0,629	0,000	Diterima
PA	0,454	0,000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian atas hipotesis di atas model yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AKIP = 14,029 - 0,016 KAP + 0,629 KPP* + 0,454 PA* + e$$

Dari tabel uji T 4.6 dapat diketahui sebagai berikut:

Uji Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel 4.5, variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,829 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar -0,016. Nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur pemerintah lebih besar

dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis 1 (H_1) ditolak.

Uji Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel 4.5, variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar 0,629. Nilai signifikansi variabel ketaatan pada peraturan perundangan lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis 2 (H_2) diterima.

Uji Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel 4.5, variabel pengendalian akuntansi memiliki nilai

sigifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar 0,454. Nilai signifikansi variabel pengendalian akuntansi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis 3 (H_3) diterima.

PEMBAHASAN

Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah (H_1) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini diduga disebabkan karena aparatur pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi atau paling tidak memiliki latar belakang sektor publik masih minim. Mungkin kesesuaian antara tugas dengan kompetensi sulit dicapai karena adanya tuntutan untuk siap ditempatkan pada posisi apapun dan kesenjangan antara formasi dengan spesifikasi aparatur pemerintah yang sesuai dan (Sofyani dan Akbar, 2015). Namun, hal tersebut dapat ditutupi dengan pelatihan, pengalaman yang cukup dan non akademik (seperti: kemampuan memimpin, kemampuan menyesuaikan diri, d.l). Selain itu, penggunaan sistem informasi dirasa mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan (H_2) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai panduan instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan, program, dan kebijakan untuk melayani masyarakat sehingga capaian kinerja akan lebih baik. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus didukung oleh peraturan perundangan seperti perbaikan laporan akuntabilitas, penerapan sistem *reward and punishment*, d.l. Instansi pemerintah yang taat pada peraturan perundangan akan menghasilkan laporan akuntabilitas yang tepat dan sesuai, sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan informasi publik. Selain itu Semakin taat suatu instansi pemerintah terhadap peraturan perundangan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel pengendalian akuntansi (H_3) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi meningkat karena pengendalian akuntansi akan mendorong para manajer subunit di OPD dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan secara lebih baik. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi dalam suatu instansi memungkinkan pemerintah dalam membuat keputusan dan mengontrol operasi dengan baik, memperkirakan biaya serta memilih alternatif terbaik sehingga dapat

meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di OPD Kulon Progo. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dapat menambah jumlah responden sehingga data yang digunakan menjadi lebih kuat, dapat memperbaiki instrumen dengan cara menambah atau mengurangi item pertanyaan sehingga model yang dibangun dapat menjadi lebih baik, dan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti anggaran berbasis kinerja, motivasi kerja, penggunaan sistem informasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Nur, E., dan Julita. 2015. Analisis Pengaruh Unsur-Unsur *Internal Control System* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1-14.
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Anonim .2014. LAKIP Kulon Progo Raih B. <https://www.kulonprogokab.go.id>. Diakses tanggal 25 September 2017 pukul 21.30 WIB.
- Apriyani, F. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cahyani, N. M. M., dan Utama, I. M. K. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 825-840.
- Darma, E.S. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Davis, J.H., Schoorman, F.D., dan Donaldson, L. 1997. *Toward a Stewardship Theory of Management*. *Academy of Management review*, 22(1), 20-47.
- Ellwood, S. 1993. *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management*. *Local Government Studies*, 19(3), 368-386.

- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Kaihatu, T.S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 8(1), 1-9.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- MenPANRB, Humas. 2017. Pacu Motivasi, Tambah DAK untuk Pemda Berakuntabilitas Tinggi. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 28 September 2017 pukul 14.30 WIB.
- MenPANRB, Humas. 2017. Penyerahan LHE AKIP 2016 Wilayah Regional II. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 22 Mei 2017 pukul 20.20 WIB.
- MenPANRB, Humas. 2017. Penyerahan LHE AKIP 2016 Wilayah Regional III, MenPANRB: Kinerja Birokrat Harus Memberi Manfaat Untuk Rakyat. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 22 Mei 2017 pukul 20.30 WIB.
- MenPANRB, Humas. 2017. Serahkan Evaluasi AKIP Wilayah I, KemenPANRB Minta Pemda Lebih Serius Benahi Tatakelola Pemerintah. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 22 Mei 2017 pukul 20.10 WIB.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A. T. 2017. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nazaruddin, I., Suryandari, E., dan Gunawan, B. 2016. Desentralisasi, Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 4(2), 77-97.
- Notoatmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Onuorah, A. C., & Appah, E. 2012. *Accountability and Public Sector Financial Management in Nigeria. Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(6), 1-17.
- Pratolo, S. 2005. *Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(2), 105-114.
- Pratolo, S., dan Jatmiko, B. 2017. *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M.
- Pratolo, S., Jatmiko, B., dan Anwar, M. 2016. *Financial Statement Public Sectors Berbasis Web-ICT: Pola Pemetaan Laporan Keuangan Melalui Web-ICT untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bantul)*. *Research Center Repository UMY*.

- Putri, E.M.N., Tanjung, A.R., dan Susilatri. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1).
- Riantiarno, R., dan Azlina, N. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 3(3).
- Rofika dan Ardianto. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi ISSN 2337-4314* 2 (2), 197-209.
- Sekretariat Negara. 1999. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sekretariat Negara. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sekretariat Negara. 1999. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Setiawan, E., Andreas, dan Rusli 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(1).
- Setyawan, H., Rusli, A., dan Hariyani, E. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 251-164.
- Sofyani, H., dan Akbar, R. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184-205.
- Sofyani, H., dan Akbar, R. 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 153-173.
- Ulum, Miftahul. 2017. Menpan Sebut Bali Bisa Jadi Contoh Akuntabilitas. <http://bali.bisnis.com>. Diakses tanggal 15 Juli 2017 pukul 20.35 WIB.

- Wahid, I., Nasir, A., dan Supriono. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 2457-2471.
- Wardhana, G. A. S., Rasmini, N. K., dan Astika, I. B. P. (2015). Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(9), 571-596.
- Wicaksana, B.A. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1), 15-27.